

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai capacity building di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kapasitas pemerintahan desa telah berlangsung secara terstruktur melalui tiga dimensi yang saling terkait, yakni pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan, yang secara bersama-sama membentuk kapasitas pemerintahan desa yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kemandirian desa yang berkelanjutan.

1. Pada dimensi pengembangan sumber daya manusia, keunggulan Desa Durensewu terletak pada kombinasi latar belakang pendidikan tinggi aparatur dengan motivasi personal yang kuat, yang menjadi keunggulan komparatif tidak dimiliki semua desa meski masih terkonsentrasi pada aparatur muda. Nilai kompetitif yang paling sulit ditiru bukan pada keterampilan teknis semata, melainkan pada budaya perbaikan pelayanan dan jaringan kelembagaan yang tumbuh secara organik. Pola pembinaan yang targeted berdasarkan bidang tugas menunjukkan pendekatan yang relevan, namun tantangan regenerasi dan keterbatasan anggaran pelatihan bagi perangkat baru menegaskan bahwa pengembangan SDM masih merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan perhatian.
2. Pada dimensi penguatan organisasi, tata kelola desa ditopang oleh mekanisme musyawarah partisipatif berjenjang, transparansi keuangan, dan fungsi

pengawasan BPD yang aktif sebagai mekanisme check and balance, meskipun ketidakakuratan estimasi anggaran menunjukkan kapasitas perencanaan teknis yang masih perlu diperkuat. Dari sisi jejaring kerjasama, Desa Durensewu berhasil membangun ekosistem kemitraan ekonomi yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui prioritas tenaga kerja lokal dengan sejumlah investor maupun pengelolaan destinasi wisata oleh warga sendiri, dengan BUMDes yang tetap menunjukkan daya lenting meski menghadapi penyempitan ruang usaha.

3. Pada dimensi reformasi kelembagaan, kepatuhan konsisten terhadap regulasi berjenjang serta kemampuan merespons perubahan kebijakan pusat, termasuk pemangkasan Dana Desa tahun 2026, direspons secara adaptif melalui diversifikasi sumber pendapatan dan pengaktifan Musrenbangdesus. Fondasi kemandirian yang telah dibangun jauh sebelum tekanan fiskal terjadi menjadikan desa ini lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal, meskipun dampaknya tetap dirasakan pada tertundanya sejumlah program fisik. Hal ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan di Desa Durensewu bukan sekadar respons reaktif, melainkan hasil dari fondasi kelembagaan yang dibangun secara konsisten sehingga organisasi pemerintahan desa memiliki daya lenting memadai untuk terus bergerak maju.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai capacity building di Desa Durensewu, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak-

pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa ke depannya.

1. Bagi pemerintah Desa Durensewu, program pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi perangkat desa yang baru dilantik perlu segera direalisasikan dan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan. Mengingat sebagian besar perangkat desa merupakan generasi muda yang baru dilantik pada tahun 2024 dan masih berada dalam fase adaptasi, percepatan program peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar output SDM aparatur desa dapat segera mencapai kondisi yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu, perlu diupayakan pemerataan kompetensi antara aparatur muda dan senior, khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi, agar tidak terjadi kesenjangan kapasitas yang menghambat efektivitas koordinasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.
2. Dalam aspek manajerial dan penganggaran, pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas perencanaan teknis aparatur desa agar estimasi anggaran yang disusun dapat lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan kebutuhan aktual saat pelaksanaan yang berujung pada penundaan program merupakan kelemahan manajerial yang apabila dibiarkan akan terus menghambat efektivitas pelaksanaan program desa. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme kajian kebutuhan yang lebih mendalam sebelum penetapan anggaran, serta melibatkan perangkat

teknis di lapangan secara lebih intensif dalam proses penyusunan anggaran agar gap antara perencanaan dan pelaksanaan dapat diminimalkan secara bertahap.

3. Terkait keberlanjutan jejaring kerjasama dan pengembangan ekonomi lokal, pemerintah desa perlu memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga usaha yang adaptif di tengah perubahan lanskap kelembagaan akibat hadirnya KDMP. Peluang kerjasama yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dan KDMP seperti penghubung pemasok pupuk dan kebutuhan lainnya perlu segera dikonkretkan menjadi kesepakatan yang tertuang secara formal agar tidak hanya berhenti sebagai wacana. Selain itu, rencana pembukaan lapak-lapak usaha di kawasan Telogo Sewu dan pengembangan unit usaha baru perlu didorong realisasinya sebagai bagian dari strategi perluasan akses pendapatan bagi masyarakat yang tidak hanya bergantung pada penyerapan tenaga kerja formal semata.
4. Dalam menghadapi keterbatasan Dana Desa yang diprediksi akan terus berlangsung akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, pemerintah desa perlu semakin mengintensifkan upaya diversifikasi sumber pendapatan desa secara terencana dan sistematis. Potensi PADes yang bersumber dari retribusi swasta, bagi hasil aset desa, maupun pengembangan destinasi wisata perlu terus dioptimalkan dan dikelola secara profesional agar tidak bergantung secara berlebihan pada Dana Desa sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Di samping itu, sosialisasi aplikasi Sapawarga kepada seluruh elemen masyarakat perlu segera direalisasikan secara

menyeluruh agar manfaat digitalisasi pelayanan publik dapat dirasakan oleh semua warga, bukan hanya mereka yang telah melek teknologi.

5. Bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu ada perhatian lebih terhadap pendampingan teknis bagi desa-desa yang tengah menghadapi tekanan fiskal akibat penyesuaian Dana Desa, termasuk Desa Durensewu. Pendampingan yang dimaksud tidak hanya berupa bimtek administratif semata, melainkan juga mencakup fasilitasi akses permodalan bagi BUMDes, pendampingan pengembangan produk wisata desa, serta penguatan jaringan antar desa dalam satu kawasan untuk mendorong kolaborasi ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kemandirian desa yang telah dirintis tidak mengalami kemunduran akibat tekanan kebijakan yang datang dari atas, melainkan justru semakin diperkuat melalui dukungan kelembagaan yang lebih sistematis dari tingkat kabupaten.